



STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI PERSPEKTIF ISLAM DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBANGUNAN INDONESIA

Muhammad Sultan Mubarak

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, muhammad.sultan.mubarak@uingusdur.ac.id, Universitas Islam Negeri (UIN)
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

ABSTRACT

This study aims to explain (1) how the concept of economic development in Islamic perspective; (2) how the general principles of economic development in Islam; and (3) how the relevance of the development of Islamic perspective in Indonesian Development. The research methodology uses a qualitative approach with the type of library research, the data collected is then analyzed using inductive analysis. The results of the study found that the focus of Indonesia's development in the last 10 years, seen in the perspective of Islamic development has not been relevant, this is because the focus of the Indonesian government is still building infrastructure not on the aspect of human resources. Borrowing the term from K.H. Abdurrahman Wahid "give the hook, not the fish". This word means that Indonesia's future development must focus on providing the needs to increase the capacity and capability of competitive and independent human resources.

Keywords: Development, Islamic Development, Indonesian Development, Development Relevance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) bagaimana konsep pembangunan ekonomi perspektif Islam?; (2) bagaimana prinsip-prinsip umum pembangunan ekonomi dalam Islam?; dan (3) bagaimana relevansi pembangunan perspektif Islam dalam Pembangunan Indonesia?. Metodologi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis induktif. Hasil penelitian menemukan bahwa bahwa fokus pembangunan Indonesia dalam 10 tahun terakhir, dilihat dalam perspektif pembangunan Islam belum relevan, hal ini dikarenakan fokus pemerintah Indonesia masih membangun infrastruktur bukan pada aspek sumber daya manusianya. Meminjam istilah dari K.H. Abdurrahman Wahid "berikan kailnya, bukan ikannya". Kata ini memiliki makna bahwa pembangunan Indonesia kedepan harus fokus pada penyediaan kebutuhan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang berdaya saing dan mandiri.

Kata Kunci: Pembangunan, Pembangunan Islam, Pembangunan Indonesia, Relevansi Pembangunan

1. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah proses yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Padahal hakekatnya pembangunan merupakan usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan dari tingkat kualitas yang dianggap kurang baik ke keseimbangan baru pada tingkat kualitas yang dianggap lebih tinggi, sehingga dapat diartikan bahwa tujuan pembangunan adalah pemerataan dalam mensejahterakan rakyat, di negara berkembang perhatian utama pembangunan terfokus pada dilema antara pertumbuhan dan pemerataan, dimana pertumbuhan yang paling sering dijadikan pembicaraan adalah pertumbuhan ekonomi [1].

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dikaji prosesnya melalui dua pendekatan, yaitu pertumbuhan ekonomi melalui lapangan usaha dan pertumbuhan ekonomi melalui sumbangan daerah-daerah administrasi dibawahnya. Pendekatan tersebut secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Selain yang digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan, juga berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang [1]

Pembangunan dalam konteks Islam tentunya dilandaskan kepada Al-Quran dan Hadist. Artinya segala kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan pembangunan ekonomi tidak bisa bertentangan dengan dua hal

tersebut. Islam pada dasarnya sudah menyediakan feature yang sesuai dengan ajarannya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Misalnya, untuk memulai sebuah usaha bisa dilakukan dengan bentuk kerjasama mudharabah, zakat dan infaq untuk pemerataan, dan sebagainya [2]

Perbedaan fundamental antara pembangunan menurut Islam dengan konvensional adalah bahwa Islam tidak hanya menginginkan umatnya untuk sejahtera baik di dunia akan tetapi juga di akhirat. Sehingga, jelas Islam memiliki pengukuran tersendiri untuk indeks pembangunan manusianya yaitu I-HDI (dicetuskan oleh MBH Anto) [2].

Selama dekade 1950-an dan dekade 1960-an tinggi rendahnya kemajuan pembangunan di suatu Negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan Gross National Product (GNP) atau Product Domestik Bruto (PDB), baik secara keseluruhan maupun per kapita, yang diyakini akan berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi lain yang pada akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan social secara lebih merata. Proses tersebut dikenal secara luas sebagai “prinsip trickle down effect.” Dengan demikian tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang paling diutamakan sedangkan masalah-masalah lain seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan, kurang mendapat perhatian [3].

Islam menginginkan pembangunan manusia yang menyeluruh dan seimbang. Pembangunan manusia harus mencakup aspek moral, spiritual, dan material. Selain itu, pembangunan dalam perspektif Islam juga harus memenuhi 4 filosofi dasar, yaitu: tauhid, rububiyah, khilafah, dan tazkiyah[2].

Berdasarkan uraian di atas, ada tiga masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini, yakni (1) bagaimana konsep pembangunan ekonomi perspektif Islam?; (2) bagaimana prinsip-prinsip umum pembangunan ekonomi dalam Islam?; dan (3) bagaimana relevansi pembangunan perspektif Islam dalam Pembangunan Indonesia?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi terdiri dari dua kata yaitu pembangunan dan ekonomi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pembangunan adalah hasil pekerjaan membangun, sedangkan ekonomi adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan pengolahan barang industri, pertanian dan perdagangan [4]

Salah satu indikator penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi mengandung makna yang berbeda. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang disertai oleh sistem kelembagaan. Adapun pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak [5]

Pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita riil penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang[6].

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat dinamis. Apapun yang dilakukan hakikat dari proses dan sifat pembangunan itu mencerminkan adanya terobosan yang baru, jadi bukan merupakan gambaran ekonomi suatu saat saja. Pembangunan ekonomi berkaitan pula dengan pendapatan perkapita riil, di sini ada dua aspek penting yang saling berkaitan yaitu pendapatan total atau yang lebih banyak dikenal dengan pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita berarti pendapatan total dibagi dengan jumlah penduduk.

2.2. Potret Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Secara umum permasalahan pokok pembangunan di Indonesia dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 adalah [7]

- a) Tingginya jumlah pengangguran dan penduduk miskin.
- b) Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).
- c) Kesenjangan pembangunan antar kelompok, wilayah dan daerah di Indonesia.
- d) Menurunnya kualitas sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.
- e) Rendahnya penegakkan hukum dan keadilan.
- f) Tingginya angka kejahatan dan masih adanya potensi konflik horisontal.
- g) Ancaman separatisme dan rendahnya kemampuan Hankam.

h) Kelembagaan demokrasi yang masih lemah.

Indonesia sebagai negara yang kaya dengan SDA namun memiliki keterbatasan dalam kualitas SDM perlu merumuskan strategi kebijakan untuk dapat mewujudkan tiga tujuan pembangunan nasional (triple bottom line) secara simultan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, pemerataan kesejahteraan kepada seluruh rakyat secara adil, dan terpeliharanya kelestarian lingkungan dan SDA. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan yang mencakup [7]:

- a. Peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi secara berkelanjutan melalui penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang kompetitif.
- b. Implementasi tata ruang wilayah secara konsisten untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
- c. Program diversifikasi pangan nasional melalui pengembangan pangan non beras untuk meningkatkan alternatif pangan rakyat menuju swasembada pangan.
- d. Pengembangan industri manufaktur yang mengandung nilai tambah (value added) yang tinggi sekaligus dapat menyerap tenaga kerja serta mendorong kegiatan ekonomi terkait.
- e. Pengembangan industri pendukung untuk memperkuat struktur industri nasional yang kokoh dan stabil bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi terkait.
- f. Peningkatan kualitas SDM melalui penguasaan dan penerapan Iptek dalam kegiatan bisnis dan ekonomi.
- g. Adanya dukungan politik (political will) dari semua unsur pemerintah yang terkait untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan kegiatan ekonomi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (verstehen) dengan tujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam, mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena strategi pembangunan ekonomi [8]

Dengan jenis penelitian kepustakaan (library reseach), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya [9].

Analisis data menggunakan induktive analysis. Analisis data induktif merupakan analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori. Tujuan penggunaan analisis dengan cara induktif ini yaitu untuk menghindari manipulasi data-data penelitian, sehingga diawali berdasarkan data baru disesuaikan dengan teori [10].

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Strategi Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam

Pembangunan dalam pemikiran Islam bermula dari kata 'imârah atau ta'mîr, (sebagaimana isyarat dalam Q.S. Hud: 61.,...Dia (Allah) telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan meminta kamu untuk memakmurkannya..." dihubungkan dengan penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi, Q.S. al-Baqarah: 30. „Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku menjadikan khalifah di muka bumi..." yakni manusia yang ditugaskan untuk melakukan pembangunan, sehingga tercipta kemakmuran. Kalimat ista'mara berasal dari kata amara bermakna: permintaan atau perintah dari Allah yang bersifat mutlak agar bangsa manusia menciptakan kemakmuran di muka bumi melalui usaha pembangunan [11]

Pembangunan merupakan pemenuhan fungsi kekhalfahan manusia di muka bumi yang akan dipertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah. Penjabaran pemenuhan fungsi kekhalfahan ini sangat penting artinya, agar manusia mengerti benar caranya berperan. Penjabaran ini memerlukan reinterpretasi terhadap berbagai konsep pembangunan [12]

Dawam Rahardjo (1983) pembangunan merupakan pemenuhan fungsi kekhalfahan, dengan merealisasikan sibghah Allah dalam mewujudkan ummatan wasathan [13].

Dalam berbagai implementasi ekonomi pembangunan selama ini diterapkan oleh banyak negara, kemiskinan penduduk, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah besar yang belum

pernah berhasil di atasi secara memuaskan, terutama di negara sedang berkembang. Sebaliknya, dalam penerapan ekonomi Islam, pernah tercatat, bahwa ada sebuah negara paling makmur di Timur Tengah pada tahun 100 hijriah, di bawah pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga hampir tidak ada yang mau menerima zakat, lantaran penduduknya sudah sejahtera (berkecukupan secara ekonomi) [3]

Sebuah negara akan menjadi makmur, dengan jumlah penduduk miskin paling rendah, bila pemerintah yang berkuasa berhati mulia, beriman dan bertakwa dan menerapkan pola hidup sederhana bagi pejabatnya, dengan mengembalikan kekayaan negara (input, pendapatan) berimbang bahkan cenderung lebih besar dalam belanja modal kepada rakyat yang dipimpin. Pada sisi lain, pemilik modal menitipkan kekayaan untuk mendorong pertumbuhan pembangunan umat, dan zakat produktif, infaq dan sadakah. Demikian halnya dengan sumber yang menyangkut hajat hidup orang banyak dioleh dengan sebaik-baiknya. Inilah salah satu contoh negara dunia yang pernah menerapkan ekonomi pembangunan Islami dengan lima pilar utama yaitu [3]:

1. Penguasa yang tidak serakah, menganut pola hidup sederhana, tidak kikir dan juga tidak boros (iqtiyadi) demikian juga rakyatnya.
2. Kesadaran dan keikhlasan setiap warganegara melaksanakan perintah Allah melalui zakat, infaq, wakaf dan sedekah dan penerimanya semakin sedikit karena malu (budaya malu dan takut terhadap hinaan Allah di dunia dan akhirat)
3. Mengelola Bazda-Baznas secara tepat sehingga distribusi sosial tepat waktu, sasaran, dan jumlah (trasparan, asas manfaat).
4. Pengelolaan sumber kekayaan alam oleh negara untuk perbaikan taraf hidup masyarakat seutuhnya, dan menghilangkan sifat- sifat pejabat yang rakus (tamak).
5. Pengawasan dan keadilan hukum terhadap pelaku perusakan darat dan laut ditindak, dan jaminan negara terhadap rakyatnya sudah seharusnya bukan sebagaimana adanya.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhiratnya. Pembangunan tidak boleh hanya berkait dengan masalah dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi (transendental). Oleh karenanya, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syari'ah, baik dalam bentuk firman Tuhan, sabda Rasul, ijma, qiyas, maupun ijtihad para ulama fakih. Pembangunan manusia secara utuh telah menjadi target pertama dalam ekonomi Islam. Dengan kata lain, pembangunan tidak sekedar membangun ekonomi rakyat, tetapi juga membangun sikap mentalnya (mental attitudes). Pembangunan juga tidak sekedar kebutuhan jasmaninya, tetapi juga kebutuhan rokahnya. Kebutuhan rohani yang terbangun akan secara otomatis mendorong kemandirian, dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya, dan membangun bangsa dan umat manusia [3].

Fahim Khan berkali-kali menegaskan kejelasan strategi pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam yang menekankan lebih pentingnya pengaturan institusional untuk secara langsung melibatkan orang dalam kegiatan kewirausahaan mereka sendiri daripada strategi memanjakan kapitalis untuk menciptakan kesempatan kerja dengan upah pasti di pasar kerja. Ekonomi Islam memiliki mekanisme built-in untuk mendukung strategi tersebut. Mekanisme yang sudah built-in ini dapat lebih diperkuat dengan langkah-langkah berikut [14]:

1. Kemampuan kewirausahaan adalah modal sumber daya manusia yang harus dikembangkan oleh pendidikan yang tepat. Perencanaan pendidikan yang tepat dapat berkontribusi banyak untuk mengurangi risiko wirausaha dengan terciptanya iklim sosial yang kondusif serta kesadaran bersama untuk mentaati segala aturan main. Tidak hanya pendidikan komersial, pendidikan Islam memiliki peranan penting yang tidak boleh diabaikan untuk menciptakan iklim sosial yang mendukung bisnis konstruktif serta menanamkan etika dan moral masyarakat.
2. Perluasan akomodasi finansial melalui sistem perbankan dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan pembiayaan bagi sumber daya manusia enterprener. Efisiensi sistem perbankan dalam menyediakan pembiayaan tersebut dalam kerangka Islam mensyaratkan reformasi substansial tidak hanya dalam struktur perbankan yang ada, tetapi pada seluruh sektor fiskal dan moneter. Dalam kerangka Islam, bank dan lembaga keuangan seharusnya diminta untuk menawarkan akomodasi keuangan hanya untuk pengusaha. Pinjaman konsumtif dari perbankan komersial hampir tidak ada karena pinjaman ini harus berupa qardh hasan (pinjaman tanpa bunga atau tanpa bagi hasil)

3. Institusi Islam hisbah harus dihidupkan kembali untuk mengawasi secara efektif norma-norma keadilan sosial ekonomi dalam perekonomian. Harga, sewa, alat-alat produksi, struktur produksi, struktur upah, pasar dan fungsinya, dan sebagainya, semua masuk dalam lingkup pengawasan lembaga ini.

Dalam sudut pandang yang lain, Musa Asy'ari menyimpulkan strategi pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam terbagi menjadi 5 hal, yakni sebagai berikut [15]:

1. **Membangun Kualitas Pribadi Manusia**
Manusia dalam perspektif Islam adalah suatu pribadi yang monodualis dan monopluralis, sifatnya transendental. Monodualisme manusia menempatkan dirinya sebagai kesatuan khalifah dan 'abdun. Karena itu, pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan fisik semata, tetapi juga berdimensi non fisik atau spiritual. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak terbatas pada usaha pemenuhan kebutuhan manusia untuk kebutuhan hidupnya di dunia, tetapi juga untuk kepentingan kehidupannya di akhirat. Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam harus di dasarkan pada etika, moral kemanusiaan yang universal untuk mencerminkan kesejahteraan dan kemakmuran lahir dan batin.
2. **Stabilitas Keamanan dan Pembangunan Ekonomi**
Negara sesungguhnya dibangun untuk menciptakan keamanan, ketenangan dan kedamaian bagi warganya. Negara yang tidak dapat mewujudkan keamanan, keselamatan dan kedamaian bagi warganya adalah negara yang gagal. Tanpa jaminan keamanan, ketenangan dan kedamaian, maka kreatifitas bangsa akan sulit tumbuh berkembang menjadi peradaban yang unggul.
3. **Keadilan, Pemerataan, dan Pertumbuhan**
Pembangunan ekonomi dalam kehidupan suatu negara menjadi amat penting karena berkaitan dengan tugas negara untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Kebutuhan rakyat itu harus dipenuhi, diatur dan dijaga oleh negara agar setiap usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat antara satu dengan yang lainnya tetap dalam kendali yang berkeadilan, seimbang, harmonis, tidak bertabrakan sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin dan termiskinkan. Tidak menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin tajam yang akhirnya dapat menjadi ancaman bagi stabilitas politik dan keamanan yang sangat vital bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
4. **Pengendalian Konsumsi dan Prinsip Hidup Sederhana**
Dampak dari hedonism dan konsumerisme yang berbasis pada materialisme yang pada akhirnya telah melahirkan keserakahan dan lingkungan hidup alam di sekitarnya, keberlangsungan hidup sesamanya yang harmonis karena manusia mempunyai keinginan untuk menguasai apa yang ada untuk kepentingan egoism pribadinya untuk mendapatkan kepuasan diri yang tidak pernah ada habisnya. Pada tingkat egisme yang hedonistic dan konsumeristik ini, manusia lupa pada makna hakiki dari kehidupannya yang sebenarnya terbatas dan tidak pernah manusai ciptakan sendiri.
5. **Tujuan Ekonomi Islam**
Dalam pandangan Islam, manusia adalah ciptaan Tuhan yang monodualis dan monopluralis. Karena itu, ekonomi sebagai bagian dari kehidupan manusia tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga non fisik. Ekonomi bukan hanya untuk menemukan kemakmuran jasmani semata, tetapi juga kemakmuran rohani. Bukan hanya untuk kehidupan di dunia tetapi juga kehidupan di akhirat. Suatu kemakmuran yang multidimensional. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang pendek, kehidupan. yang dekat. Dunia berasal dari kata dana yang artinya qarab yaitu dekat. Oleh karena itu, dunia bukan tujuan hidup manusia. Manusia tidak boleh terpedaya oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sementara sifatnya, apalagi dengan mengabaikan kebahagiaan jangka panjang di akhirat. Tujuan ekonomi Islam secara teologis adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan dengan cara menggali potensi ekonomi yang ada dalam semua ciptaan Tuhan. Penggalan dan pengembangan potensi yang ada dalam semua ciptaan Tuhan, yaitu alam semesta seisinya bukan untuk kepentingan yang merusak dan menghancurkan sumber daya alam, apalagi untuk kepentingan yang sempit yaitu untuk memperkaya dirinya sendiri, tetapi untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama, untuk tujuan yang lebih panjang, untuk generasi penerus kehidupan yang lebih baik.

4.2 Prinsip-Prinsip Umum Pembangunan Ekonomi Dalam Islam

Prinsip-prinsip umum yang menjadi falsafah Islam terhadap pembangunan tersebut adalah seperti berikut:

- 1) Tauhid (Keesaan Tuhan).

Tauhid memiliki makna pengesaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta serta segala isinya. Sedangkan cara pengesahannya dengan melaksanakan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah SWT semata. Tauhid ini menetapkan hukum mengenai perhubungan antara tuhan dengan manusia dan juga antara manusia dengan sesama manusia. Hubungan antara manusia dengan tuhan maupun sebaliknya, memberi makna bahwa alam semesta ini tidaklah wujud dengan kebetulan atau tanpa direncanakan. Melainkan Allah SWT tuhan yang satulah yang menciptakannya dengan berbagai hikmat yang tersirat dibaliknya. Sehingga hikmat inilah yang menjadikan manusia bernilai dan berarti di alam dunia. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk beribadat mentaati tuhan yang satu dengan dikaruniai kuasa ikhtiar, berfikir dan lainnya.

2) Rububiyah (Keesaan Dalam Mengurus Alam)

Mengesakan Allah SWT dalam penciptaan, pemberian rezki, pemeliharaan alam semesta, penghancurannya, pencabutan nyawa dan pembangkitan manusia kembali merupakan aplikasi dari keyakinan rububiyah. Rububiyah juga termasuk dalam pengaturan Ilahi untuk penyuburan, kesinambungan kehidupan dan mengarah segala makhluk menuju kepada kesempurnaannya. Sifat rububiyah juga mengandungi maksud kepada bimbingan seluruh apa yang Allah SWT ciptakan untuk menuju kebahagiaan (Sa'adah) di dunia dan di akhirat.

3) 'Adalah (Kesamaan Hak dan Keharmonian)

Al-'Adlu atau asal kata dasarnya dari kalimat 'adila ya'dilu yaitu kata pinjaman daripadanya ialah 'adalah bermaksud pertengahan (al-Tawasut) atau tidak berlebihan (Ifrath) dan juga tidak ceroboh (Tafrih), atau lebih tepatnya bermaksud memberikan sesuai dengan haknya. Menurut Muhammad Fuad Abdu al-Baqiy kalimat adil dalam al-Quran disebutkan sebanyak 28 kali yang termaktub di dalam 28 ayat pada 11 surat. Kalimat Adil termaktub dalam berbagai bentuk seperti 'adl, qisĀ, mizan, qaĀd yang lawan kata dari kalimat tersebut yaitu Dzulm(kezaliman), itsmu (dosa) dan dhalal (kesesatan).

4) Khilafah (peran manusia)

Khilafah merupakan kesadaran seseorang terhadap amanah dan tanggungjawab yang Allah SWT bebankan sebagai pengganti utusan-Nya di muka bumi. Tanggungjawab sebagai insan kamil dalam bentuk perilaku antara manusia dengan rabnya, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Nilai khilafah menciptakan mashlahah yang maksimal dan mencegah kerusakan di muka bumi termasuk usaha-usaha dalam memakmurkan bumi Allah SWT dengan konsep Islam. Sehingga segala perlakuan manusia dalam rangka memakmurkan bumi mestilah tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah SWT. Kepemilikan, pemanfaatan sumber alam mesti dalam batas sewajarnya tidak membuat kerusakan dan melampaui batas.

5) Tazkiyyah (penyucian serta pertumbuhan)

Tazkiyyah atau artinya mensucikan atau pertumbuhan dan kebaikan. Secara epistemologi tazkiyyah berarti kebersihan dan perlakuan yang memiliki metode dan teknik, sifatnya dari syariat, dan kesannya terhadap tingkah laku serta usaha untuk mencari keredhaan Allah SWT. Tugas semua nabi yang diutuskan Allah SWT tidak lain untuk menyempurnakan tazkiyyah manusia dalam semua hubungannya. Contohnya dengan Allah s.w.t, dengan manusia, dengan alam sekitar dan dengan masyarakat maupun negara. Sebagaimana Nabi Muhammad s.a.w. diutuskan di muka bumi ini tidaklah lain untuk menyucikan ummatnya. Setidaknya penyucian yang telah beliau lakukan sejak diangkat menjadi rasul-Nya yaitu membersihkan aqidah daripada perbuatan syirik, menyucikan akhlak daripada perbuatan maksiat yang telah menjadi tradisi kaum jahiliyyah dan menyucikan harta dari perkara-perakara yang subhat maupun gharar kepada halal dan tayyib (baik).

4.3 Relevansi Pembangunan Perspektif Islam Dalam Pembangunan Indonesia

Pembangunan Indonesia sudah direncanakan sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Pada tanggal 12 April 1947, Presiden membentuk Panitia Pemikir Siasat Ekonomi atau yang sering dikenal sebagai Brain Trust. Panitia tersebut berhasil merumuskan rencana pembangunan sementara yang diberi judul "Dasar Pokok Daripada Plan Mengatoer Ekonomi Indonesia", namun di tahun yang sama juga dibuat perencanaan baru untuk beberapa sektor ekonomi yang diberi nama "Plan Prodoeksi tiga Tahun RI" yang meliputi tahun 1948-1950 untuk bidang pertanian, peternakan, perindustrian, dan kehutanan. Ketika masa Federal, disusun "Rentjana Kesedjahteraan Istimewa 1950-1951" khusus menangani bidang pangan. Kemudian disusul dengan "Rentjana Urgensi untuk Perkembangan Industri" tahun 1951-1952. Perencanaan-perencanaan diatas

bersifat spesifik pada bidang-bidang tertentu, sehingga dalam kenyataannya tidak dapat terealisasi dengan baik [16]

Kemudian pada tahun 1952, ada usaha-usaha untuk dapat melakukan suatu perencanaan dengan cara yang lebih menyeluruh. Usaha tersebut adalah dengan membentuk Biro Perantjangan Negara. Dalam perencanaan ini, disusun suatu Rentjana Pembangoenan Lima Tahun 1956- 1960 yang kemudian baru dilegalkan melalui undang-undang pada tahun 1958, namun pada tahun 1959 diganti dengan rencana baru yang dinamai Rentjana Pembangoenan Nasional Semesta Berentjana (RPNSB) 1961- 1969 yang dilaksanakan selama 8 tahun. Pada rencana 8 tahun ini dibagi atas rencana tahapan 3 tahun dan 5 tahun. Pada tahun 1964, dibentuk Badan Perentjanaan Pembangoenan Nasional (Bappenas) yang merupakan perpecahan dari Dewan Perantjangan Nasional (Depernas) [16]

Sejak Orde Baru, perencanaan-perencanaan pembangunan di Indonesia dimulai dengan perencanaan yang teknis ilmiah. Bappenas merancang Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Rapelita I) yang dimulai 1 April 1969, dan rapelita ini diperbaharui setiap lima tahun sekali. Rapelita disusun berdasarkan Pedoman Pola Umum Jangka Panjang menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Mulanya, Repelita ke I dan ke II masih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi meskipun aspek pemerataan juga dimasukkan, tetapi mulai Repelita ke-III dan Repelita ke-IV, tujuan pembangunan lebih dipertegas dengan dicanangkannya Trilogi Pembangunan:

- (1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
- (2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan
- (3) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Di Indonesia, dikenal tiga tahapan perencanaan, yakni:

1. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
2. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Rapelita)
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dalam 10 tahun terakhir pembangunan Indonesia lebih terfokus ke infrastruktur hal ini terlihat dalam data berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang terhitung dimulai sebelum 2014 dan selesai setelah tahun 2014 terdapat 18 bendungan dan 7 bandar udara.
2. Sementara pembangunan infrastruktur yang dimulai setelah tahun 2014 terdapat 12 bendungan dan 22 bandar udara yang selesai sampai September 2022, 12 bendungan dan 9 bandar udara dengan target selesai tahun 2023, 10 bendungan dengan target selesai akhir tahun 2022, 5 bendungan dengan target selesai tahun 2024, serta 4 bendungan dengan target selesai tahun 2025.
3. Sementara itu beberapa capaian infrastruktur desa di antaranya adalah jalan desa sejauh 316.590 km, Jembatan desa sepanjang 1.597.529 m, Air bersih desa sebanyak 1.474.544 unit, Irigasi desa 501.054 unit, Pasar desa 12.297 unit, dan Posyandu 42.357 unit.
4. konstruksi jalan pada era Jokowi yang dimulai sebelum tahun 2014 dan selesai setelah tahun 2015 yaitu sejauh 222,2 km. Sedangkan konstruksi yang dimulai setelah tahun 2015 dan selesai sampai September 2022 sejauh 1.540,1 km.

Pemerintah meneruskan pembangunan dari pemerintahan sebelumnya dan juga fokus pada infrastruktur yang langsung menopang aktivitas perekonomian masyarakat. Peningkatan infrastruktur membangun budaya tertib dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan data ini maka dapat disimpulkan bahwa fokus pembangunan Indonesia dalam 10 tahun terakhir, jika dilihat dalam perspektif pembangunan Islam belum relevan, hal ini dikarenakan fokus pemerintah Indonesia masih membangun infrastruktur bukan pada aspek sumber daya manusianya. Meminjam istilah dari K.H. Abdurrahman Wahid “berikan kailnya, bukan ikannya”. Kata ini memiliki makna bahwa pembangunan Indonesia kedepan harus fokus pada penyediaan kebutuhan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang berdaya saing dan mandiri.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Islam menginginkan pembangunan manusia yang menyeluruh dan seimbang. Pembangunan manusia harus mencakup aspek moral, spiritual, dan material. Selain itu, pembangunan dalam perspektif Islam juga harus memenuhi 4 filosofi dasar, yaitu: tauhid, rububiyah, khilafah, dan tazkiyah. Strategi pembangunan dalam perspektif Islam minimal mencapai 5 aspek, yaitu; pertama, Membangun Kualitas Pribadi Manusia. Kedua,

Stabilitas Keamanan dan Pembangunan Ekonomi. Ketiga, Keadilan, Pemerataan, dan Pertumbuhan. Keempat, Pengendalian Konsumsi dan Prinsip Hidup Sederhana. Terakhir, tujuan dari ekonomi Islam. Prinsip-prinsip umum yang menjadi falsafah Islam terhadap pembangunan mencakup aspek Tauhid (Keesaan Tuhan), Rububiyah (Keesaan Dalam Mengurus Alam), 'Adalah (Kesamaan Hak dan Keharmonian), Khilafah (peran manusia) dan Tazkiyah (penyucian serta pertumbuhan).

Pemerintah meneruskan pembangunan dari pemerintahan sebelumnya dan juga fokus pada infrastruktur yang langsung menopang aktivitas perekonomian masyarakat. Peningkatan infrastruktur membangun budaya tertib dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan data ini maka dapat disimpulkan bahwa fokus pembangunan Indonesia dalam 10 tahun terakhir, jika dilihat dalam perspektif pembangunan Islam belum relevan, hal ini dikarenakan fokus pemerintah Indonesia masih membangun infrastruktur bukan pada aspek sumber daya manusianya.

Saran

Hasil penelitian ini menyarankan agar pembangunan pemerintah untuk kedepannya tidak terpaku pada infrastruktur saja, pemebangunan harus lebih pada aspek sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Lestari, P. A. Pasha, M. Oktapianti, and H. Noviarita, "Teori Pembangunan Ekonomi," *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 95–112, Jul. 2021, doi: 10.24042/revenue.v2i2.9071.
- [2] F. Nugrahaningsih, "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam – SEF UGM," <https://sef.feb.ugm.ac.id/>, 2016. <https://sef.feb.ugm.ac.id/pembangunan-ekonomi-dalam-perspektif-ekonomi-islam/> (accessed Dec. 16, 2022).
- [3] Djumadi, "KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI PERSPEKTIF ISLAM," *Tahkim*, vol. Vol. XII, no. 1, 2016.
- [4] Badudu and Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar. Harapan, 2001.
- [5] L. Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi. Daerah*. Yogyakarta: BPFE, 1999.
- [6] S. Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- [7] I. Yuliadi, *Perekonomian Indonesia, Masalah dan Implementasi. Kebijakan*. Yogyakarta: UPFE-UMY, 2009.
- [8] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Gravindo Persada, 2014.
- [9] S. Hadi, *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- [10] M. Rohmadi and Y. Nasucha, *Dasar-Dasar Penelitian*. Surakarta: Pustaka Brilliant, 2015.
- [11] T. N. FITRIA, "KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL," *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, vol. VOL. 02, no. NO. 03, 2016.
- [12] N. Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam. Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- [13] M. D. Rahardjho, *Esai-Esai Ekonomi Politik*. Jakarta: LP3ES, 1983.
- [14] A. Murtadho, "STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI YANG ISLAMI MENURUT FAHIM KHAN," *Economica*, vol. Volume VII, no. Edisi 2, 2016.
- [15] M. Asy'arie, *Filsafat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 2015.
- [16] L. T. Tarmidi, *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Pusat Antar Universitas - Studi. Ekonomi Universitas Indonesia, 1992.